



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan pembangunan bidang ekonomi, serta bidang pendidikan mendapat tempat yang teratas dalam pembangunan dan perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Hal ini mengingat keberhasilan pembangunan nasional berupa pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan akan sangat bergantung pada daya dukung kualitas sumber daya manusianya itu sendiri. Sejalan dengan hal itu, Harbinson (1973) mengemukakan bahwa Sumber daya alam dan sumber daya kapital dianggap sebagai faktor-faktor produksi pasif, sedangkan sumber daya manusia adalah agen-agen aktif yang mengakumulasikan kapital, mengesplotasi sumber daya alam, membangun sosial ekonomi dan organisasi sosial politik, serta membawa tercapainya pembangunan nasional .

Dalam pendekatan sumber daya manusia, tujuan pembangunan nasional adalah adanya pendayagunaan semaksimal mungkin manusia seutuhnya dalam aktivitas yang lebih produktif dan pengembangan sebanyak mungkin dalam segi keterampilan, pengetahuan dan kemampuan diri dari kekuatan tenaga kerja yang berhubungan erat dengan setiap aktivitasnya. Pernyataan yang mendasari ini adalah bahwa suatu bangsa tidak mengembangkan dan mendayagunakan kekuatan dan kehandalan tenaga kerja secara efektif, akan tidak mungkin untuk membangun masalah-masalah lainnya. Dengan demikian strategi pembangunan melalui

pendekatan dan cara pandang yang demikian lebih menekankan pada aspek manusia, dari pada non manusia.

Pendidikan dan pelatihan merupakan bagian penting dan integral dari pembangunan nasional memiliki nilai dan kekuatan strategis dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia harus didukung dengan peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada berbagai dimensi mutu sumber daya manusia pembangunan tersebut.

Pembangunan pada sektor pendidikan merupakan upaya untuk merealisasikan amanat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, karena kesempatan untuk memperoleh pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (USPN) Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 4 menyebutkan bahwa : Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu, manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Sedangkan pada pasal 9 dan 10 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pendidikan dilaksanakan dalam dua jalur, yakni jalur Pendidikan Sekolah (PS) dan jalur Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Jalur Pendidikan Sekolah meliputi satuan

Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi. Sedangkan jalur pendidikan luar sekolah mencakup keluarga, kelompok belajar, kursus-kursus dan satuan lain yang sejenis. Pada satuan sejenis di dalamnya termasuk kelompok bermain, penitipan anak, pusat magang, panti asuhan, panti latihan, penyuluhan, Kepramukaan, dan kegiatan-kegiatan transformasi edukatif melalui media massa (baik media cetak maupun elektronik), serta lembaga Diklat yang diselenggarakan pemerintah maupun pihak swasta.

Pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah merupakan suatu kesatuan integral dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila, dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan, agar dapat membangun dirinya sendiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan nasional.

Pendidikan adalah merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa datang. Pendidikan pada hakekatnya dilaksanakan sepanjang hayat, yang mencakup segala aspek, proses dan siklus kehidupan manusia sejak dalam kandungan, hingga usia lanjut atau sampai ke liang lahat. Pendidikan Sekolah dan Pendidikan Luar Sekolah itu merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Oleh sebab itu peran aktif semua pihak dalam semua jalur jenis dan jenjang pendidikan diselenggarakan secara terpadu dan diarahkan pada peningkatan kualitas, serta pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendidikan Luar Sekolah yang

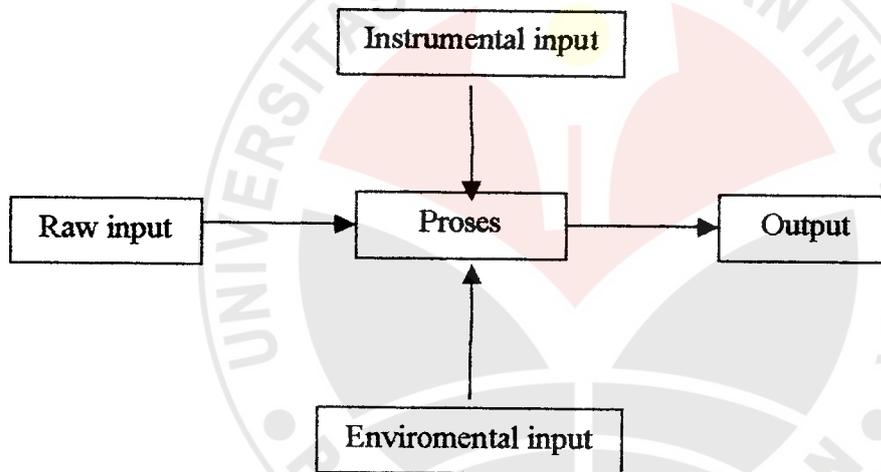
diselenggarakan pemerintah tidak hanya dilaksanakan oleh instansi di lingkungan Depdikbud, (sekarang Depdiknas), melainkan juga semua lembaga pemerintah, baik departemen, maupun non departemen.

Banyak pengertian dan definisi tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang dikemukakan para pakar, namun demikian esensinya menunjukkan pada suatu "kegiatan pendidikan yang terorganisir di luar sistem pendidikan sekolah" (Kleis, 1973; 6; Coombs dalam Sudjana, 1996; Colletta, 1975). "Selain itu pendidikan luar sekolah memiliki fleksibilitas" (Qureshi, 1987; 35) dan memiliki keterkaitan yang erat dengan pasar kerja (Paulston Le Roy, 1982; 337, Blaug, 1979;35). Pendidikan luar sekolah berbeda dengan pendidikan sekolah, terutama dari segi fleksibilitas, relevansi dan fungsionalisasi dari keseluruhan komponen programnya. Dengan demikian model pembelajaran yang perlu dikembangkan pada lembaga pendidikan luar sekolah harus mengacu kepada ciri-ciri sebagaimana diuraikan di atas.

Untuk memahami konsep pendidikan luar sekolah, Sutaryat Trisnamansyah (1986;35-40) menjelaskan bahwa ada dua pendekatan utama yang sering dilakukan para ahli, yakni konsep konvensional dan konsep dinamika kesadaran tujuan. Menurut pendekatan konsep konvensional dari proses pendidikan bahwa pendidikan luar sekolah dapat dipahami secara berdampingan dengan pendidikan persekolahan. Keduanya dibandingkan dan ditelaah antara perbedaan dan persamaanya. Klasifikasi pendidikan luar sekolah ditinjau dari segi tujuan sistem penyampaian, karakteristik, paedagogik, hirarki dalam sturuktur program, kredensial dan kebutuhan. Selain itu dapat pula ditinjau satu taksonomi yang mencakup unsur pensponsoran. Missi,

perubahan perilaku, proses, peserta dan dana. Kelompok Dinamika Kesadaran Tujuan dalam proses pendidikan menyebutkan bahwa pendidikan tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah, tanpa memperhitungkan inti dari sumber belajar, yakni pendidik (tutor) dan peserta (warga belajar).

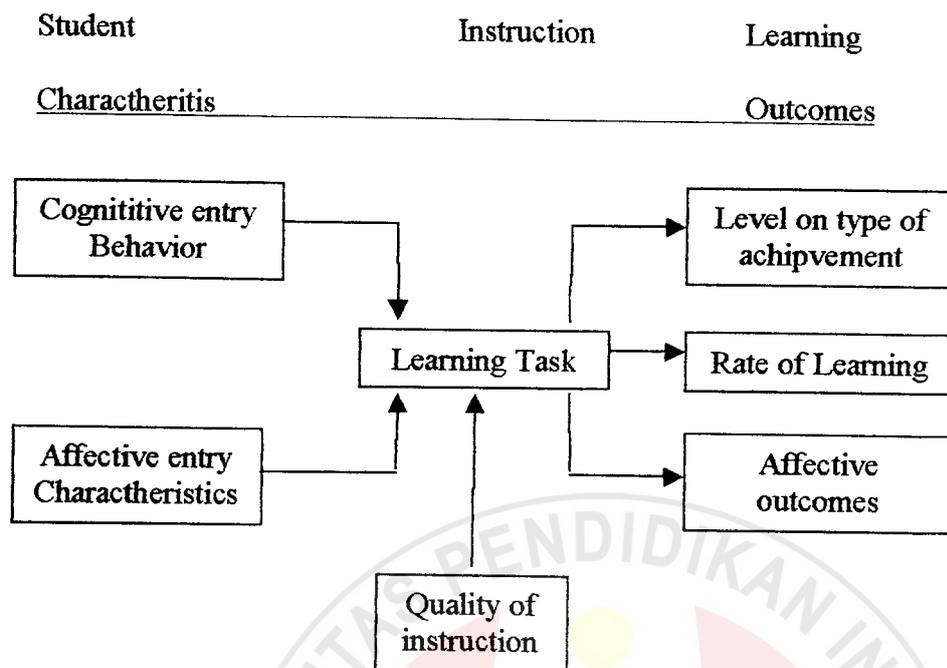
Terlepas dari perbedaan cara pandang tersebut, secara sistematis proses belajar mengajar atau proses pembelajaran sebagai inti pendidikan merupakan suatu sistem, yang terdiri dari raw input, proses, environmental input, dan out put (Sumadi, 1984; 251), keterkaitannya dapat digambarkan secara sistemik sebagai berikut :



GAMBAR 1-1

KOMPONEN-KOMPONEN SISTEM

Secara lebih terperinci Bloom (1962) yang terkenal dengan taksonominya, mengemukakan bahwa belajar adalah merupakan suatu sistem sebagaimana dipaparkan pada gambar di bawah ini :



GAMBAR I-2

SISTEM PEMBELAJARAN MENURUT BLOOM

Dari gambar bagan di atas tentang sistem pembelajaran, dapat diketahui betapa pentingnya tenaga pendidik, guru atau widyaiswara sebagai instrumen pokok dalam proses pembelajaran. Meskipun pendidikan itu merupakan suatu proses sosialisasi yang melibatkan berbagai faktor, akan tetapi seringkali sering dituding sebagai penyebab rendahnya mutu pendidikan adalah guru (Ranuwihardjo, 1986). Kondisi demikian menunjukkan betapa pentingnya eksistensi tenaga pendidik dalam setiap aktivitas proses pembelajaran. Oleh sebab itu kualitas guru/pendidik diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar yang merupakan satu indikator pendidikan (Hugges, 1976).

Tenaga pendidik sebagai salah satu komponen yang besar peranannya dalam proses pembelajaran perlu dituntut untuk memiliki kemampuan. Penelitian Sutaryat (1993), di Jawa Barat mengemukakan bahwa faktor kesiapan profesional, kesiapan personal dan tempat dimana guru dalam melaksanakan tugas sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan pelaksanaan tugasnya. Sutadiprta dalam Rachmat (1995), menyebutkan bahwa kemampuan esensial dari seorang guru dalam memotivasi siswa. Kemampuan ini sangat diperlukan dalam pembelajaran mengingat mengajar itu adalah menyediakan lingkungan agar siswa mampu belajar.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 8 tahun 1974, tentang pokok-pokok kepegawaian ditegaskan bahwa salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah adalah meningkatkan kemampuan profesional pegawai negeri melalui pendidikan dan pelatihan yang terencana dan diselenggarakan secara terus menerus serta terpadu sesuai tuntutan pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil Republik Indonesia.

Sementara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1994, Pendidikan dan Pelatihan Jabatan pegawai Negeri Sipil terdiri dari Diklat Prajabatan dan Diklat dalam jabatan. Diklat prajabatan adalah Diklat yang dipersyaratkan dalam pengangkatan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Diklat dalam jabatan terdiri Diklat Struktural, Diklat fungsional dan Diklat teknis.

Pendidikan dan Pelatihan Adiministrasi Umum (Diklat Adum) yang dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Pendidikan Nasional, yang bekerja sama dengan Kantor Wilayah Depdiknas, adalah merupakan

suatu pendidikan penjenjangan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan dipromosikan sebelum mereka diangkat menduduki jabatan eselon V dan IV, agar dapat melaksanakan pekerjaannya sehari-hari secara tertib, lancar dan efisien dan efektif. Dengan demikian Diklat Adum ini memberikan bekal kemampuan administrasi dasar sehingga para peserta mampu mengenali kedudukan organisasi dan peran instansi masing-masing dalam pemerintahan negara, serta mampu melaksanakan tugasnya sehari-hari secara efektif dan efisien.

Widyaiswara sebagai tenaga pendidik dan salah satu komponen dalam proses pembelajaran di lembaga – lembaga Diklat departemen dan non departemen merupakan faktor dinamis yang diharapkan dapat membelajarkan, mengarahkan, memotivasi dan mendinamisasi pembelajaran peserta didik dalam konteks materi yang dilaksanakan guna mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu widyaiswara perlu memiliki bekal kemampuan yang mendasar dalam hal pendidikan. Khususnya menyangkut konsep pembelajaran itu sendiri.

Sedangkan hasil penelitian Sudjana (1993), di Propinsi Jawa Barat, menunjukkan bahwa lebih dari setengahnya (64,6 %) widyaiswara memiliki latar belakang pendidikan non kependidikan, dimana sebagian besar dari mereka (74%) juga tidak mendapatkan Akta Kependidikan. Kondisi ini berhubungan dengan kemungkinan timbulnya masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi mereka dalam melakukan tugas sebagai widyaiswara di lembaga Diklat. Dalam temuannya dikemukakan bahwa widyaiswara pada umumnya masih menghadapi kendala dalam hal penggunaan atau pengembangan materi dan pengelolaan pembelajaran yang dihadapi oleh widyaiswara

baik yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Muda, Magister, dan Doktor, maupun yang memiliki Akta Mengajar dan Sarjana Kependidikan, Sarjana Non Kependidikan yang tidak mengantongi Akta Mengajar.

Dari hasil studi peninjauan yang dilakukan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Sawangan Bogor Jawa Barat, para widyaiswara telah melaksanakan proses aktivitas pembelajaran. Eksistensi widyaiswara sangat penting dalam keberhasilan setiap kegiatan pembelajaran pada balai Pusdiklat pegawai tersebut. Akan tetapi dari segi kuantitas maupun berbagai karakteristik yang mendukung mutu widyaiswara kondisinya masih dianggap belum memadai. Hal itu disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang pendidikan, baik pendidikan sekolah, maupun pendidikan luar sekolah, terlebih lagi dengan perbedaan latar belakang pendidikan Kependidikan dan Non Kependidikan dalam aktivitas manajemen pembelajaran.

Studi peninjauan lain menemukan beberapa pendapat tentang kemampuan para alumni peserta Diklat Adum dan nilai tambah yang diperolehnya. Hal ini menunjukkan belum maksimal dalam mencapai sasaran yang diharapkan. Selain itu ditemukan pula adanya kesan yang merupakan persepsi dari beberapa responden, baik para lulusan, maupun pimpinan lembaga Pusdiklat yang menunjukkan bahwa para widyaiswara masih sangat diharapkan kemampuan maksimalnya, dalam mengelola pembelajaran di lembaga Pusdiklat tersebut.

Berbagai studi literatur menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan dalam proses pembelajaran ditentukan pula oleh unsur “keahlian, kredibilitas dan dedikasi” yang

tinggi dari para pendidik. Sejalan dengan itu, maka keadaan widyaiswara dalam membelajarkan peserta didiknya akan sangat tergantung pula pada tanggapan dan pengakuan para peserta didiknya. Hal ini terlihat dari persepsi dan tanggapan terhadap kemampuan para widyaiswara tersebut.

Atas dasar dan kondisi yang digambarkan tersebut di atas, maka dianggap perlu adanya studi atau pengkajian secara ilmiah tentang manajemen pembelajaran para widyaiswara berdasarkan latar belakang pendidikan, pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlokasi di Sawangan Bogor Propinsi Jawa Barat.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah : Manajemen Pembelajaran pada Pusdiklat Pegawai Depdiknas, selama ini belum ditemukan melalui suatu hasil penelitian dan kajian ilmiah. Kalaupun ada hanya sebatas laporan-laporan teknis penyelenggaraan suatu program yang tidak secara langsung belum mengungkapkan indikator manajemen pembelajaran pada Pusdiklat Pegawai Depdiknas RI yang berlokasi di Sawangan Bogor tersebut.

Adapun aspek-aspek yang diteliti meliputi :

1. Latar Belakang Pendidikan Widyaiswara dengan indikator :
 - a. Latar belakang Pendidikan Kependidikan
 - b. Latar belakang Pendidikan Non Kependidikan
2. Manajemen Pembelajaran dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Penyusunan tujuan pembelajaran

- b. Penyusunan rancangan belajar
- c. Penyusunan dan pemilihan materi
- d. Pemberian motivasi terhadap peserta
- e. Pembinaan disiplin dan ketertiban peserta
- f. Perhatian terhadap perbedaan individual
- g. Pemilihan, pemilikan dan penggunaan metode pembelajaran.
- h. Pengadaan pemilikan dan penggunaan media
- i. Penciptaan iklim kelas
- j. Pelaksanaan penilaian pembelajaran

Dari berbagai indikator tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga komponen dasar, yang meliputi :

1. Perencanaan (*Planing*),
2. Pelaksanaan (*Processing*) dan
3. Penilaian (*Evaluation*).

C. Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan diarahkan pada manajemen pembelajaran yang berdimensi profesional, dimana eksistensi widyaiswara adalah merupakan tenaga fungsional yang mengemban dan melakukan tugas kependidikan.

Persoalan yang perlu mendapat kajian adalah faktor-faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan Manajemen Pembelajaran yang dihadapi para Widyaiswara di lembaga Pusdiklat Pegawai Depdiknas RI tersebut ?

Teori *Human Capital* menyebutkan bahwa pendidikan seseorang adalah merupakan suatu investasi yang kuat untuk menjadikan manusia itu lebih berkemampuan dan produktif. Atas dasar teori ini beberapa hasil penelitian telah membuktikan bahwa karakteristik pendidikan lebih dominan terhadap keberhasilan dan pemecahan masalah yang dihadapi seseorang.

Muhajir dan Mincer (1985), menyimpulkan bahwa latar belakang pendidikan, khususnya pendidikan luar sekolah seseorang berpengaruh terhadap kemampuan produktivitasnya. Begitu urgennya pendidikan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang melalui pendidikan dan latihan seringkali dianggap sebagai sarana produksi dan merupakan modal investasi manusia.

Dengan melakukan investasi dalam pendidikan seseorang dapat meningkatkan kapasitasnya. Hal ini dapat dipahami jika ditelusuri dari tujuan umum yang ingin dicapai dengan upaya pendidikan yang berorientasi pada pembentukan dan pengembangan tiga ranah, yakni kognisi, afeksi dan psikomotorik. Dengan wawasan yang diperoleh melalui pendidikan diharapkan seseorang dapat beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungannya, kemudian memberikan sumbangsih terhadap perkembangan lingkungan sosialnya.

Atas dasar pertimbangan itu, diduga bahwa manajemen pembelajaran para widyaiswara berhubungan erat dengan latar belakang pendidikan. Dan penelitian ini

akan dibatasi pada aspek latar belakang pendidikan widyaiswara, kaitannya dengan aktivitas manajemen pembelajaran widyaiswara pada lembaga Pusdiklat pegawai Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlokasi di Sawangan Bogor Jawa Barat.

2. *Pertanyaan Penelitian*

Atas dasar kerangka pemikiran dan hasil penelitian penjajakan, yang dihubungkan dengan pembatasan masalah yang dilakukan, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah ada perbedaan antara latar belakang pendidikan Kependidikan dan Non Kependidikan dalam perencanaan pembelajaran ?
2. Apakah ada perbedaan antara latar belakang pendidikan Kependidikan dan Non Kependidikan terhadap pelaksanaan pembelajaran ?
3. Apakah ada perbedaan antara latar belakang pendidikan Kependidikan dan Non Kependidikan terhadap penilaian pembelajaran ?
4. Apakah ada perbedaan antara latar belakang pendidikan (Kependidikan dan Non Kependidikan) terhadap manajemen pembelajaran ?.

D. Definisi Operasional Variabel dan Indikator.

Sesuai dengan pembatasan masalah kajian dalam penelitian ini, akan diuraikan batasan definisi operasional variabel yang mengandung indikator beberapa istilah pokok yang terlibat dalam penelitian ini, yakni .

1. **Widyaiswara :** adalah Pegawai Negeri Sipil, dengan jabatan tenaga fungsional, yang diberi tugas dan tanggung jawab mendidik, mengajar,

atau melatih secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada unit pendidikan dan pelatihan (Diklat) instansi pemerintah. Secara operasional yang dimaksud dengan widyaiswara dalam penelitian ini adalah tenaga pendidik (widyaiswara) di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Depdiknas Republik Indonesia di Sawangan Bogor Jawa Barat.

2. Manajemen Pembelajaran : adalah manajemen atau pengelolaan pembelajaran di lembaga Diklat pemerintah yang meliputi indikator : (1) penyusunan tujuan, (2) penyusunan pengalaman belajar, (3) penyusunan materi, (4) pemberian motivasi terhadap peserta Diklat, (5) pembinaan disiplin dan ketertiban peserta, (6) perhatian terhadap perbedaan individual, (7) pemilihan, pemilihan dan penggunaan metode atau teknik pembelajaran, (8) pengadaan, pemilihan dan penggunaan media, (9) penciptaan iklim kelas, (10) penilaian hasil belajar., dan penelaian terhadap dampak pembelajaran. (Sudjana, 1991). Sedangkan dalam penelitian ini dibatasi pada tujuan pembelajaran (1), hingga pelaksanaan penilaian pembelajaran (10), yang dibagi dalam tiga komponen utama, yakni Perencanaan, Pelaksanaan dan Penilaian atau Evaluasi.
3. Latar Belakang Pendidikan : adalah latar belakang pendidikan (formal/persekolahan) yang terakhir ditempuh, widyaiswara, yakni yang berasal dari latar belakang pendidikan alumni PT dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (*LPTK/FKIP/IKIP*) dan Non Kependidikan, (*alumni Perguruan Tinggi di luar LPTK*) pada saat

bertugas sebagai widyaiswara di Pusdiklat Pegawai Depdiknas Republik Indonesia.

E. Tujuan Penelitian .

1. Tujuan Umum

Sesuai dengan problematik yang telah dipaparkan, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai perbedaan latar belakang pendidikan dengan aktivitas manajemen pembelajaran widyaiswara di lembaga Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Depdiknas Republik Indonesia yang berlokasi di Sawangan Bogor Jawa Barat. Dengan demikian dapat dideskripsikan dan dianalisis tentang “Perbedaan kegiatan manajemen pembelajaran pada Pusdiklat Pegawai Depdiknas, yang dilihat dari aspek latar belakang pendidikan widyaiswara, yakni latar belakang pendidikan Kependidikan dan Non Kependidikan”.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagaimana tertera dan dijelaskan pada pertanyaan penelitian yakni :

1. Untuk mengetahui tentang perbedaan antara LBP (Kependidikan dan Non Kependidikan) dalam perencanaan pembelajaran.
2. Untuk mengetahui tentang perbedaan antara LBP (Kependidikan dan Non Kependidikan) dalam pelaksanaan pembelajaran.
3. Untuk mengetahui tentang perbedaan LBP (Kependidikan dan Non Kependidikan) dalam pelaksanaan pembelajaran.

4. Untuk mengetahui tentang perbedaan LBP (Kependidikan dan Non Kependidikan) terhadap manajemen pembelajaran widyaiswara.

F. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yakni aspek teoritis dan aspek praktis :

a. Manfaat Teoritis.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu untuk kepentingan teori dan pengembangannya. Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan dalam bidang pendidikan luar sekolah, khususnya tentang temuan empirik di lapangan berupa manajemen pembelajaran para widyaiswara sebagai tenaga pendidik dalam kegiatan pendidikan orang dewasa. Berdasarkan temuan ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan untuk merumuskan konsep profil tenaga kependidikan orang dewasa dalam konteks dimana kegiatan pendidikan berlangsung, atas dasar penugasan secara birokratis, bahwa pendidikan yang diselenggarakan ini erat kaitannya dengan promosi jabatan birokratis (struktural dan fungsional) bagi para alumni peserta Diklat Adum.

b. Manfaat Praktis.

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

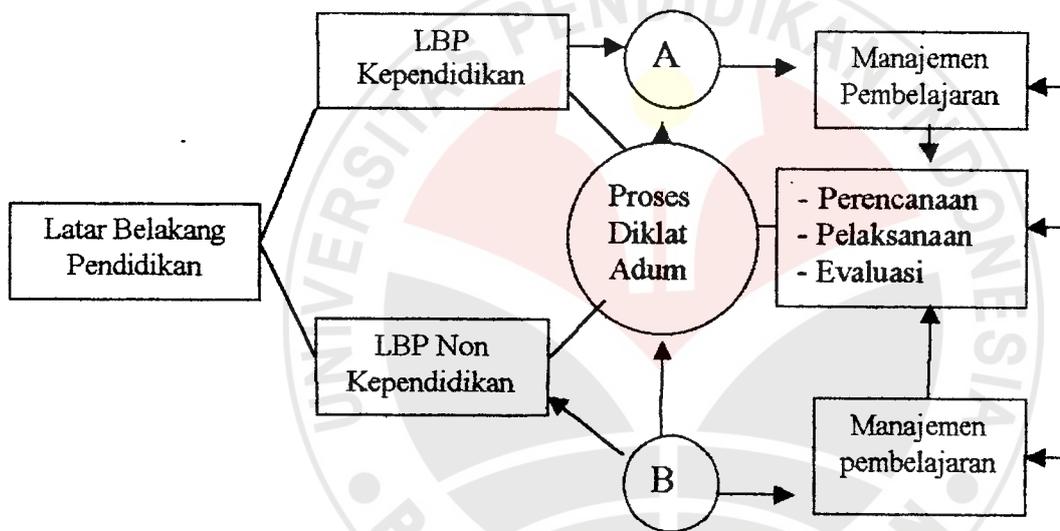
1. Bagi lembaga pendidikan tinggi kependidikan, khususnya Jurusan Pendidikan Luar Sekolah dan lebih terfokus pada Konsentrasi Pelatihan, guna menambah

pengalaman empirik yang bisa dimanfaatkan sebagai contoh kasus dalam aktivitas pembelajaran baik di kelas, maupun di lapangan. Diharapkan melalui mata kuliah yang relevan dapat mempermudah dalam merumuskan program-program penelitian, maupun pengabdian masyarakat, khususnya pada lembaga lembaga Diklat yang mempunyai kegiatan dalam mengelola pembelajaran.

2. Hasil yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk melakukan kegiatan pembinaan yang relevan dengan kebutuhan belajar peserta Diklat Adum pada lembaga Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Lembaga penyelenggara program pelatihan diharapkan dapat mengetahui aktivitas manajemen pembelajaran para widyaiswara di lembaga Pusdiklat Pegawai Depdiknas RI tersebut.

G. Paradigma Penelitian

Pendidikan sebagai usaha sadar selalu memiliki organisasi dan sistematika tertentu, begitupun dengan proses pelaksanaan manajemen pembelajaran pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, selalu mengacu pada pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Untuk lebih jelas tentang paradigma penelitian ini dapat digambarkan secara sistemik sebagai berikut :



GAMBAR 1-3
PARADIGMA PENELITIAN

Keterangan :

A = Latar Belakang Pendidikan Kependidikan

B = Latar Belakang Pendidikan Non Kependidikan

1. Apakah $A = B$?
2. Apakah $A < B$?
3. Apakah $A > B$?



